

**LAPORAN DATA EKONOMI  
PERIKANAN DAN KELAUTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
SEMESTER 2 TAHUN 2024**

An aerial photograph showing a coastal landscape. The land is covered in dense green vegetation, with several small buildings and a pier visible near the water's edge. The water is a clear, light blue-green color, with some darker areas suggesting deeper water or shadows.

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas Karunia dan Rahmat-Nya Laporan Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 2 Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Kompilasi Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 2 Tahun 2024 merupakan laporan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan demi terwujudnya Laporan Kompilasi Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 2 Tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan data bagi instansi pemerintah, masyarakat, dan pengguna data lainnya.

Tanjungpinang, November 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kepulauan Riau,



Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196905042000031008

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Ruang Lingkup .....	5
1.3. Konsep dan Definisi .....	6
BAB II KOMPILASI DATA .....	8
2.1. Peran Sektor Perikanan dalam PDRB Kepulauan Riau .....	8
2.2. Volume Produksi Perikanan Tangkap Semester 2 Tahun 2024 .....	9
2.3. Volume Produksi Perikanan Budidaya Semester 2 Tahun 2024 .....	11
2.4. Volume Produksi Olahan Perikanan Semester 2 Tahun 2024 .....	15
2.5. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Semester 2 Tahun 2024 .....	17
2.6. Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Semester 2 Tahun 2024 .....	20
2.7. Ketersediaan Stok Ikan Semester 2 Tahun 2024 .....	22
2.8. Jumlah <i>Cold Storage</i> Semester 2 Tahun 2024 .....	25
2.9. Luas Kawasan Konservasi Perairan .....	27
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN .....	30
3.1. Kesimpulan .....	30
3.2. Saran .....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Riau, yang terletak di pesisir barat Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Laut yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah ini. Selain itu, Kepulauan Riau juga memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional, yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan hasil perikanan dan kelautan.

Sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penurunan kualitas lingkungan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan, serta perubahan iklim yang dapat memengaruhi keberlanjutan hasil laut. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis data yang akurat menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor ini.

Laporan Data Ekonomi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau Semester 2 Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi sektor perikanan dan kelautan di provinsi ini. Data yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan, serta sebagai referensi untuk perencanaan dan pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perkembangan, tantangan, dan potensi sektor ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam mendukung sektor ini ke depan.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Laporan ini membahas berbagai aspek penting terkait dengan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024. Fokus utama laporan ini adalah untuk menyajikan data dan analisis mengenai volume produksi perikanan, baik yang berasal dari perikanan tangkap maupun budidaya, serta perkembangan dalam industri pengolahan hasil perikanan. Data mengenai volume produksi olahan perikanan akan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, laporan ini juga akan membahas volume ekspor perikanan dari Provinsi Kepulauan Riau, termasuk jenis produk perikanan yang dieksport serta negara tujuan ekspor utama. Aspek ini penting untuk menggambarkan peran sektor perikanan dalam perdagangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Laporan ini juga akan mencakup informasi mengenai jumlah kapal perikanan yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau. Data ini meliputi jenis kapal, seperti kapal tangkap, kapal pengangkut, dan kapal pengolahan, yang berperan penting dalam menunjang kegiatan perikanan di wilayah ini.

Aspek lain yang akan dibahas adalah ketersediaan stok ikan di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Ketersediaan stok ikan merupakan indikator penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan menghindari penangkapan ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, laporan ini akan menganalisis kondisi stok ikan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Laporan ini juga akan menyajikan informasi mengenai jumlah dan kapasitas fasilitas cold storage yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Cold storage sangat penting dalam mendukung distribusi hasil perikanan, menjaga kualitas produk, serta mengurangi kerugian pascapanen. Oleh karena itu, analisis mengenai jumlah dan efisiensi cold storage menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini.

Terakhir, laporan ini akan mengulas luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau, yang berfungsi untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Kawasan konservasi memiliki peran

yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan bahwa kegiatan perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, ruang lingkup laporan ini mencakup semua aspek yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang relevan di Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, perencanaan sektor perikanan, serta pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di provinsi ini.

### **1.3. Konsep dan Definisi**

Laporan ini mengacu pada berbagai konsep dan definisi yang relevan dengan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam laporan ini merujuk pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Berikut adalah beberapa konsep dan definisi utama berdasarkan regulasi yang berlaku:

- a. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dan hasil laut lainnya dari perairan menggunakan alat tangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 1 ayat 4), perikanan tangkap mencakup segala kegiatan penangkapan ikan, baik secara komersial maupun untuk konsumsi rumah tangga.
- b. Perikanan budidaya merujuk pada kegiatan pembiakan ikan dan organisme perairan lainnya dalam kondisi yang terkontrol di wadah atau kolam. Dalam UU No. 31 Tahun 2004, perikanan budidaya didefinisikan sebagai usaha untuk membudidayakan ikan dalam berbagai sistem untuk tujuan konsumsi maupun komersial.
- c. Produksi olahan perikanan mencakup hasil pengolahan produk perikanan mentah menjadi produk makanan siap saji atau lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pengolahan Sumber Daya Perikanan, industri pengolahan perikanan harus mengikuti standar kualitas dan pengawasan agar memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

- d. Ekspor perikanan adalah kegiatan penjualan dan pengiriman produk perikanan ke luar negeri. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perdagangan, ekspor perikanan harus mematuhi regulasi ekspor dan standar internasional mengenai keamanan pangan dan keberlanjutan sumber daya laut.
- e. Kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan hasil tangkapan, atau pengolahan ikan di laut. Definisi kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2021 tentang Kapal Perikanan, yang mengatur tentang ukuran, jenis, dan kapasitas kapal untuk kegiatan perikanan.
- f. Stok ikan merujuk pada jumlah atau populasi ikan di perairan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 mengatur tentang pentingnya pengelolaan stok ikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
- g. Cold storage adalah fasilitas penyimpanan hasil perikanan pada suhu rendah untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 tentang Pengolahan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mengatur standar fasilitas pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, termasuk cold storage.
- h. Kawasan konservasi perairan adalah wilayah laut yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 1 ayat 8), kawasan konservasi berfungsi untuk melestarikan ekosistem laut dan sumber daya alam di dalamnya.

Dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Penggunaan konsep-konsep yang jelas dan terukur menurut hukum diharapkan dapat memberikan panduan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor ini secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **KOMPILASI DATA**

#### **2.1. Peran Sektor Perikanan dalam PDRB Kepulauan Riau**

Sektor perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, yang secara signifikan berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai provinsi yang memiliki lebih dari seribu pulau dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, perikanan menjadi salah satu sumber daya alam utama yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan ekonomi daerah.

Dalam konteks PDRB, sektor perikanan terdiri dari dua subsektor utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kegiatan perikanan tangkap, yang mencakup penangkapan ikan di laut menggunakan berbagai alat tangkap, menyumbang bagian besar dari hasil produksi perikanan. Selain itu, perikanan budidaya yang berkembang di beberapa daerah pesisir juga memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam penyediaan produk ikan untuk konsumsi lokal dan pasar internasional.

Di sisi lain, sektor perikanan juga turut mendukung subsektor industri pengolahan, yang mencakup pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah seperti ikan olahan, fillet, ikan asin, dan produk lainnya. Proses pengolahan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain itu, sektor perikanan di Kepulauan Riau juga memiliki potensi besar dalam ekspor produk perikanan, terutama ikan dan udang, yang dikirim ke berbagai negara tujuan, termasuk Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya. Ekspor ini memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah dengan meningkatkan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, sektor perikanan berperan dalam meningkatkan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, dengan kontribusi yang mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta ekspor hasil perikanan. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan sektor ini dapat lebih memaksimalkan kontribusinya terhadap ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

## **2.2. Volume Produksi Perikanan Tangkap Semester 2 Tahun 2024**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap. Letak geografisnya yang terdiri dari banyak pulau dan perairan yang kaya akan sumber daya alam menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian daerah ini. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak nelayan dan pelaku industri terkait.

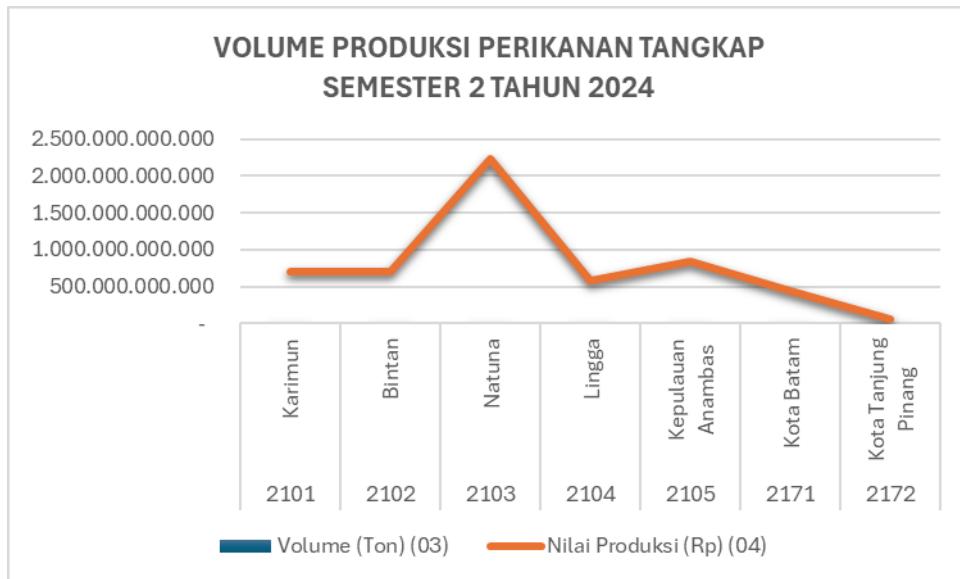
Laporan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai volume produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024. Data yang digunakan mencakup informasi tentang volume hasil tangkapan ikan dalam satuan ton serta nilai produksi dalam satuan Rupiah yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut adalah data volume produksi perikanan tangkap yang tercatat pada semester kedua tahun 2024 di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Semester 2 Tahun 2024

<b>Kode Wilayah (01)</b>	<b>Kabupaten/Kota (02)</b>	<b>Volume (Ton) (03)</b>	<b>Nilai Produksi (Rp) (04)</b>
2101	Karimun	19.034	701.274.255.000
2102	Bintan	39.347	706.819.700.000
2103	Natuna	74.276	2.240.693.630.000
2104	Lingga	13.376	584.317.722.000
2105	Kepulauan Anambas	20.611	835.804.130.000
2171	Kota Batam	13.291	437.866.258.500
2172	Kota Tanjung Pinang	2.101	62.804.182.000
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>182.037</b>	<b>5.569.579.877.500</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 1. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Semester 2 Tahun 2024

Subsektor perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mengalami peningkatan yang substansial pada periode Semester 2 Tahun 2024.

Secara agregat, volume produksi perikanan tangkap pada Semester 2 mencapai 182.036,75 Ton. Angka ini menandai kenaikan sebesar 18,81% dibandingkan dengan volume produksi yang tercatat pada Semester 1 Tahun 2024 yang berjumlah 153.218,99 Ton.

Peningkatan produksi sebesar hampir 19% ini mengindikasikan adanya faktor-faktor pendorong utama, yang kemungkinan besar terkait dengan kondisi oseanografi yang lebih kondusif (seperti musim puncak penangkapan) atau peningkatan efektivitas operasional armada penangkapan di wilayah Kepulauan Riau. Kenaikan volume produksi ini secara langsung meningkatkan nilai ekonomi dari subsektor ini. Total nilai produksi perikanan tangkap pada Semester 2 Tahun 2024 mencapai Rp5,57 Triliun.

Secara geografis, kontribusi volume produksi perikanan tangkap pada Semester 2 didominasi oleh tiga wilayah utama, yang menegaskan posisi mereka sebagai sentra perikanan tangkap:

1. Kabupaten Natuna mempertahankan posisinya sebagai kontributor terbesar dengan volume mencapai 74.276,39 Ton, menyumbang lebih dari 40% dari

- total produksi Kepri. Kontribusi besar ini sejalan dengan lokasi Natuna yang berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kaya sumber daya ikan.
2. Kabupaten Bintan menempati posisi kedua dengan volume signifikan sebesar 39.346,96 Ton, menunjukkan peran penting perairan Bintan dalam pasokan ikan regional.
  3. Kabupaten Kepulauan Anambas menyumbang 20.611,08 Ton, yang bersama Natuna, menyoroti pentingnya wilayah perairan utara sebagai lumbung ikan utama di Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah lain seperti Karimun (19.033,97 Ton), Lingga (13.376,45 Ton), dan Kota Batam (13.291,25 Ton) juga memberikan kontribusi signifikan, dengan Kota Batam sebagai pusat distribusi dan pengolahan hasil tangkap.

Data Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan subsektor perikanan tangkap berada dalam tren pertumbuhan yang kuat, baik dari sisi volume maupun nilai produksi. Peningkatan volume sebesar 18,81% menjadi indikasi positif bagi ketersediaan sumber daya ikan dan peningkatan aktivitas nelayan. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah penyumbang terbesar seperti Natuna, untuk menjamin kelestarian sumber daya di masa mendatang.

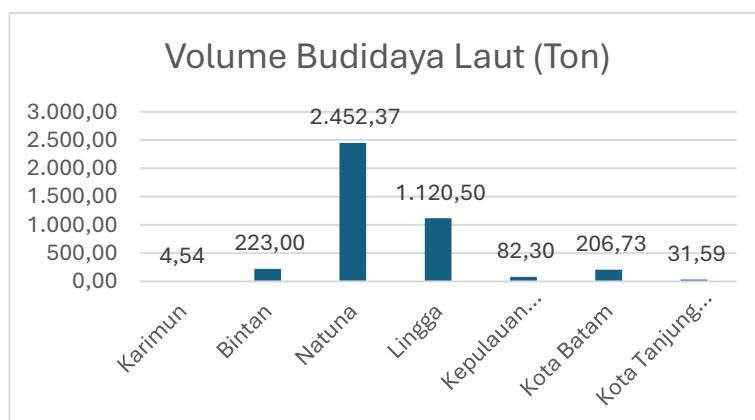
### **2.3. Volume Produksi Perikanan Budidaya Semester 2 Tahun 2024**

Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, mengingat daerah ini memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa jenis, antara lain budidaya laut, budidaya payau, budidaya tawar, dan budidaya rumput laut. Data produksi budidaya perikanan ini penting untuk mengevaluasi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah serta merencanakan kebijakan dan program yang dapat mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya. Data yang disajikan berikut mencakup volume produksi berdasarkan jenis budidaya yang meliputi budidaya laut, payau, tawar, dan budidaya rumput laut di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2. Volume Produksi Perikanan Budidaya Semester 2 Tahun 2024

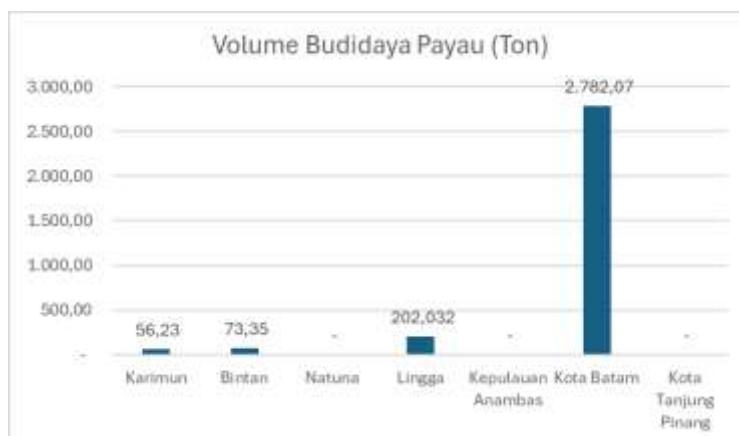
Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Volume Budidaya Laut (Ton) (03)	Volume Budidaya Payau (Ton) (04)	Volume Budidaya Tawar (Ton) (05)	Volume Budidaya Rumput Laut (Ton) (06)
2101	Karimun	4,54	56,23	296,37	4.343,00
2102	Bintan	223,00	73,35	1.194,60	-
2103	Natuna	2.452,37	-	141,73	-
2104	Lingga	1.120,50	202,032	8,711	1.111,81
2105	Kepulauan Anambas	82,30	-	0,15	-
2171	Kota Batam	206,73	2.782,07	6.325,63	2.779,59
2172	Kota Tanjung Pinang	31,59	-	89,51	-
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>4.121,02</b>	<b>3.113,68</b>	<b>8.056,71</b>	<b>8.234,40</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



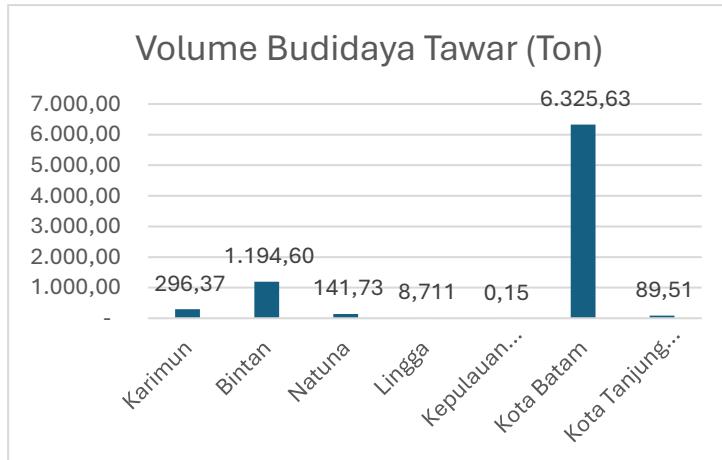
Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 2.1 Volume Produksi Perikanan Budidaya Laut Semester 2 Tahun 2024



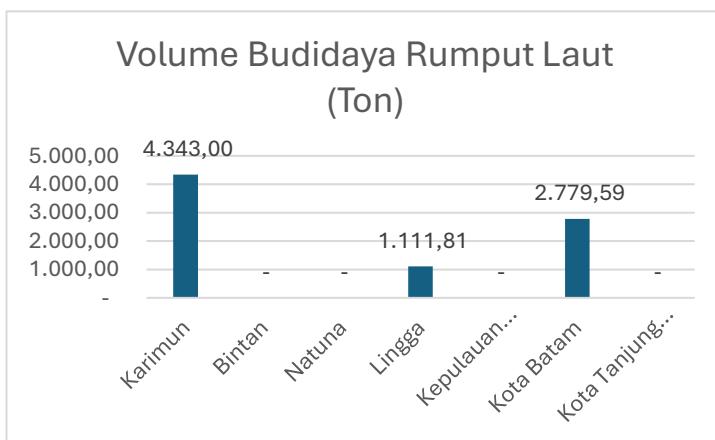
Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 2.2 Volume Produksi Perikanan Budidaya Payau Semester 2 Tahun 2024



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 2.3 Volume Produksi Perikanan Budidaya Tawar Semester 2 Tahun 2024



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 2.4 Volume Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Semester 2 Tahun 2024

Subsektor perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif pada Semester 2 Tahun 2024. Volume total produksi budidaya, yang mencakup budidaya Laut, Payau, Tawar, dan Rumput Laut, mencapai 22.407,71 Ton.

Capaian ini merefleksikan kenaikan signifikan sebesar 28,16% dibandingkan dengan total volume produksi budidaya pada Semester 1 Tahun 2024 yang tercatat sebesar 17.483,95 Ton.

Pertumbuhan yang hampir mencapai sepertiga ini menggarisbawahi peran subsektor budidaya sebagai pendorong baru pertumbuhan ekonomi perikanan Kepulauan Riau, serta menunjukkan keberhasilan program intensifikasi dan diversifikasi komoditas budidaya.

Analisis per kategori budidaya menunjukkan bahwa hampir semua segmen mengalami peningkatan volume produksi:

1. Budidaya Tawar: Peningkatan Paling Dominan

Budidaya air tawar mencatatkan peningkatan volume terbesar. Produksi pada Semester 2 mencapai 8.050,42 Ton, naik signifikan dibandingkan Semester 1 (5.236,15 Ton).

Kontribusi Utama: Kota Batam mendominasi segmen ini dengan volume mencapai 6.325,63 Ton. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemanfaatan lahan darat di Batam untuk produksi perikanan tawar, yang menjadi sumber ketahanan pangan lokal.

2. Budidaya Payau: Lonjakan Luar Biasa

Subsektor budidaya payau juga menunjukkan lonjakan kinerja, dengan volume naik dari 1.822,68 Ton (S1) menjadi 3.113,68 Ton (S2). Peningkatan ini berindikasi pada peningkatan pemanfaatan lahan tambak untuk komoditas bernilai tinggi seperti udang atau bandeng.

Kontribusi Utama: Sama seperti budidaya tawar, Kota Batam menjadi penyumbang terbesar budidaya payau dengan 2.782,07 Ton, mengkonsolidasikan Batam sebagai pusat produksi budidaya.

3. Budidaya Rumput Laut

Meskipun bukan yang tertinggi dalam persentase, volume rumput laut tetap menjadi kontributor volume terbesar di antara empat kategori, mencapai 8.234,40 Ton pada Semester 2. Volume ini naik dari 7.627,01 Ton di Semester 1.

Kontribusi Utama: Kabupaten Karimun (4.343 Ton) dan Kota Batam (2.779,59 Ton) adalah produsen rumput laut utama.

4. Budidaya Laut

Budidaya laut menunjukkan peningkatan yang moderat, dari 2.798,11 Ton (S1) menjadi 3.009,21 Ton (S2).

Kontribusi Utama: Kabupaten Natuna menjadi produsen budidaya laut terbesar dengan 2.452,37 Ton, yang kemungkinan besar didominasi oleh komoditas kerapu atau ikan bernilai ekonomi tinggi lainnya.

Performa subsektor perikanan budidaya di Semester 2 Tahun 2024 sangat meyakinkan, ditandai dengan pertumbuhan sebesar 28,16% secara total. Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh komoditas laut dan rumput laut tradisional, tetapi juga oleh lonjakan yang terjadi pada budidaya darat/payau, khususnya di Kota Batam. Hal ini mencerminkan keberhasilan diversifikasi dan intensifikasi usaha budidaya, serta menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan bahan baku industri olahan perikanan.

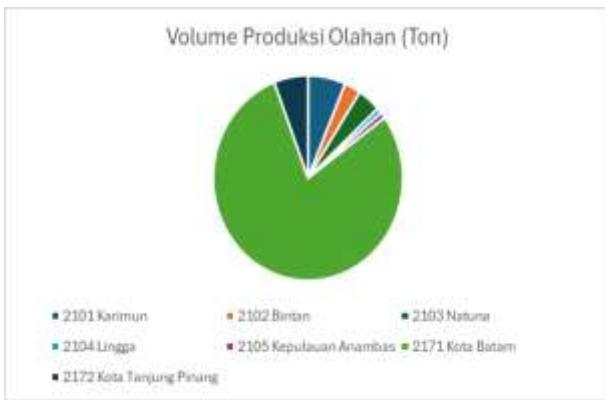
#### 2.4. Volume Produksi Olahan Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Sektor perikanan olahan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Pengolahan perikanan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pemasaran produk perikanan ke pasar lokal dan internasional. Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, telah mengembangkan industri pengolahan perikanan untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Data yang disajikan mencakup produksi olahan perikanan di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah ini, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor perikanan olahan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 3. Volume Produksi Olahan Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Volume Produksi Olahan (Ton) (03)
2101	Karimun	791.461,00
2102	Bintan	343.667,86
2103	Natuna	486.514,80
2104	Lingga	108.331,80
2105	Kepulauan Anambas	122.263,00
2171	Kota Batam	9.783.677,00
2172	Kota Tanjung Pinang	716.964,01
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>12.352.879,47</b>



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 3. Volume Produksi Olahan Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Sektor industri pengolahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan performa yang paling spektakuler di antara subsektor lainnya pada Semester 2 Tahun 2024. Volume total produksi olahan perikanan melonjak tajam, mencapai 12.352.879,47 Ton.

Capaian ini merepresentasikan kenaikan luar biasa sebesar 66,34% dibandingkan dengan volume produksi olahan pada Semester 1 Tahun 2024 yang tercatat sebesar 7.426.393 Ton.

Lonjakan produksi olahan yang signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dan utilisasi pabrik pengolahan di Kepulauan Riau. Peningkatan ini sangat mungkin didorong oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dari perikanan tangkap dan budidaya di Semester 2, serta tingginya permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, terhadap produk perikanan olahan Kepri. Ini mengindikasikan keberhasilan dalam upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk hasil laut daerah.

Secara geografis, produksi olahan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dikonsolidasikan oleh beberapa wilayah dengan infrastruktur industri yang memadai:

#### 1. Kota Batam

Lokomotif Industri Olahan Kota Batam mendominasi secara mutlak dengan menyumbang volume produksi olahan tertinggi, yaitu 9.783.677 Ton pada Semester 2. Kontribusi Batam yang mencapai hampir 80% dari total produksi olahan Provinsi ini menegaskan peran kota tersebut sebagai pusat industri, pengolahan, dan logistik perikanan.

## 2. Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang menjadi kontributor terbesar kedua dengan volume 716.964,01 Ton, menunjukkan peran ibukota provinsi dalam rantai nilai perikanan.

## 3. Karimun dan Natuna

Kabupaten Karimun dan Natuna juga memberikan kontribusi yang signifikan, masing-masing dengan 791.461 Ton dan 486.514,8 Ton. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa industri pengolahan mulai merata dan berkembang di dekat sumber bahan baku (perikanan tangkap), meskipun skala industri Batam jauh lebih besar.

Subsektor produksi olahan perikanan adalah *leading sector* dalam data ekonomi perikanan Kepulauan Riau Semester 2 Tahun 2024, ditunjukkan oleh pertumbuhan volume yang melebihi 66%. Kinerja ini mencerminkan tingginya kapasitas pengolahan daerah dan kemampuan industri untuk menyerap hasil produksi tangkap dan budidaya. Keberhasilan ini penting untuk menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk perikanan Kepri di pasar global. Fokus kebijakan selanjutnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk olahan, serta menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku yang stabil untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan ini.

## 2.5. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Sektor ekspor hasil perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, Kepulauan Riau telah menjadi salah satu pusat produksi perikanan yang menghasilkan berbagai produk unggulan yang dieksport ke pasar internasional. Ekspor perikanan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pada semester kedua tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang signifikan dalam ekspor hasil kelautan dan perikanan. Berbagai komoditas perikanan dari sektor tangkap dan budidaya berhasil dieksport ke berbagai negara, memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi daerah. Laporan ini bertujuan untuk memaparkan data terkait volume dan nilai ekspor

perikanan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode tersebut.

Tabel 4. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Volume Ekspor Perikanan (Ton) (03)	Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan (USD) (04)
2101	Karimun	548,17	1.054.579,50
2102	Bintan	2.599,36	10.657.206,00
2103	Natuna	122,41	350.510,00
2104	Lingga	549,76	1.102.279,50
2105	Kepulauan Anambas	152,20	884.032
2171	Kota Batam	4.572,54	8.172.666,27
2172	Kota Tanjung Pinang	354,86	284.179,00
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>8.899,29</b>	<b>22.505.452,27</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Kinerja perdagangan internasional subsektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan volume ekspor dibandingkan semester sebelumnya.

Total volume ekspor perikanan pada Semester 2 Tahun 2024 tercatat sebesar 8.899,30 Ton. Angka ini menunjukkan penurunan volume sebesar 2.958,03 Ton jika dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2024 yang mencapai 11.857,33 Ton.

Penurunan volume ekspor sebesar 24,95% ini perlu menjadi perhatian utama. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam Volume Produksi Olahan di Semester 2, penurunan volume ekspor ini mengindikasikan adanya kendala yang mungkin timbul dari:

1. Gangguan Logistik:

Masalah pada rantai pasok atau jadwal pengiriman ekspor.

2. Pergeseran Pasar:

Adanya pengalihan sebagian produk olahan ke pasar domestik atau pasar regional non-ekspor.

3. Keterbatasan Permintaan:

Penurunan daya beli atau permintaan dari negara tujuan ekspor utama.

Meskipun volume ekspor menurun, penting untuk menganalisis nilai ekspor yang dihasilkan. Nilai total ekspor hasil kelautan dan perikanan pada Semester 2 Tahun 2024 mencapai \$22.505.452,27 USD.

Penurunan nilai total ekspor ini sejalan dengan penurunan volume. Namun, perbandingan nilai ekspor per ton perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah terjadi peningkatan harga jual rata-rata komoditas ekspor.

Secara geografis, aktivitas ekspor masih didominasi oleh dua wilayah utama, namun dengan fokus yang berbeda:

1. Kota Batam: Kota Batam tetap menjadi kontributor volume ekspor terbesar dengan 4.572,54 Ton, menyumbang lebih dari separuh (sekitar 51%) total volume ekspor provinsi. Nilai ekspor Batam mencapai \$8.172.666,27 USD.
2. Kabupaten Bintan: Fokus Nilai Tinggi Meskipun volume ekspor Bintan hanya 2.599,36 Ton, Kabupaten Bintan mencatatkan nilai ekspor tertinggi dengan \$10.657.206,00 USD. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Bintan mengekspor komoditas *premium* atau produk olahan bernilai tambah tinggi yang harganya jauh melampaui produk ekspor rata-rata di wilayah lain.

Volume ekspor perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Semester 2 Tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 24,95%. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan pada Volume Produksi Olahan dan Tangkap, yang menandakan adanya ketidaksinkronan antara kapasitas produksi dan kemampuan penyerapan pasar ekspor di paruh kedua tahun ini.

Dukungan kebijakan perlu diarahkan pada identifikasi hambatan ekspor (logistik dan regulasi) dan promosi pasar yang lebih agresif untuk menyerap surplus produksi yang dihasilkan di Semester 2, sehingga potensi ekonomi dari produksi tangkap dan olahan yang tinggi dapat dimaksimalkan melalui jalur ekspor.

## 2.6. Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Semester 2 Tahun 2024

Jumlah armada perahu dan kapal yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau memberikan gambaran mengenai skala dan kapasitas produksi sektor perikanan tangkap. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi tentang jumlah perahu dan kapal penangkap ikan yang tercatat pada semester kedua tahun 2024, termasuk kategori kapal berdasarkan ukuran tonase (GT). Data ini mencakup berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencerminkan potensi perikanan tangkap di setiap wilayah.

Tabel 5. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Ukuran Tonase (GT) Semester 2 Tahun 2024

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	PTM (03)	MT 1-5 GT (04)	KM 1-5 GT (05)	KM 6-10 GT (06)	KM 11-20 GT (07)	KM 21-30 GT (08)	KM 31-50 GT (09)	KM 51-100 GT (10)	KM 101-200 GT (11)	Jumlah (12)
2101	Karimun	124	422	4.543	100	73	410	22	156	19	5.869
2102	Bintan	24	30	913	102	98	187	2	6	1	1.363
2103	Natuna	708	1.695	7.174	4.306	122	52	-	-	-	14.057
2104	Lingga	1.971	-	6.429	30	-	-	-	-	-	8.430
2105	Kepulauan Anambas	486	-	2.412	38	19	-	-	-	-	2.955
2171	Kota Batam	1.932	4.926	4.082	260	61	146	3	35	19	11.464
2172	Kota Tanjung Pinang	150	50	1.188	45	2	33	3	6	2	1.479
2100	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>5.395</b>	<b>7.123</b>	<b>26.741</b>	<b>4.881</b>	<b>375</b>	<b>828</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>41</b>	<b>45.617</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

**Gambar 5. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Ukuran Tonase (GT) Semester 2 Tahun 2024**

Total armada perahu dan kapal penangkap ikan di Provinsi Kepulauan Riau pada Semester 2 Tahun 2024 mencatatkan ekspansi yang signifikan, mencapai 45.617 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan substansial sebesar 11.065 unit jika dibandingkan dengan total armada pada Semester 1 Tahun 2024 yang berjumlah 34.552 unit.

Peningkatan volume armada sebesar 32,02% dalam waktu enam bulan merupakan pertumbuhan yang sangat cepat. Ekspansi ini mengindikasikan adanya investasi besar-besaran atau migrasi kapal penangkap ikan ke wilayah Kepulauan Riau, yang tentunya berkorelasi positif dengan peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap di Semester 2. Pertumbuhan ini perlu dikelola secara hati-hati untuk mencegah *over-fishing* di perairan yang sensitif. Meskipun terjadi lonjakan total armada, struktur armada perikanan Kepulauan Riau tetap didominasi oleh kapal skala kecil, yang datanya mencerminkan fokus utama operasional:

1. Dominasi Skala Kecil (Perikanan Rakyat): Armada yang terdiri dari Perahu Tanpa Motor (PTM), Motor Tempel (MT), dan Kapal Motor (KM) 1-5 GT tetap menjadi tulang punggung. Kabupaten Natuna (14.057 unit) dan Kabupaten Lingga (8.430 unit) adalah wilayah utama yang menampung armada perikanan rakyat.

2. Armada Skala Industri (Di Atas 30 GT): Armada kapal besar (di atas 30 GT) yang mendukung penangkapan di laut lepas terkonsentrasi di pusat-pusat logistik. Kabupaten Karimun berfungsi sebagai *home base* utama untuk kapal besar, menampung mayoritas kapal KM 51-100 GT dan KM 101-200 GT.

Kenaikan total armada sebesar 11.065 unit mengindikasikan bahwa terjadi penambahan kapal baru dalam jumlah besar, terutama pada kategori-kategori yang sebelumnya tidak teridentifikasi atau pada rentang GT yang sudah ada. Ekspansi cepat ini menjadi faktor krusial di balik peningkatan produksi perikanan tangkap dan menunjukkan tingginya minat investasi di sektor perikanan Kepri.

Kenaikan total armada menjadi 45.617 unit di Semester 2 Tahun 2024, menandakan pertumbuhan sektor perikanan tangkap yang sangat dinamis. Implikasi utama dari ekspansi armada sebesar 32,02% ini adalah perlunya penguatan kebijakan:

1. Pengendalian Kapasitas Penangkapan: Pemerintah perlu segera memantau dan mengendalikan penambahan armada untuk memastikan tingkat eksploitasi tidak melampaui batas yang diizinkan, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi kelebihan tangkap.
2. Peningkatan Infrastruktur: Ekspansi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, TPI, dan *cold storage*, yang datanya sebelumnya menunjukkan stagnansi, agar hasil tangkapan yang melimpah dapat dipertahankan kualitasnya.
3. Pengelolaan Sumber Daya: Kebijakan perizinan yang ketat dan pengawasan operasional harus diterapkan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan yang stabil, terutama dengan meningkatnya daya tangkap yang dibawa oleh 11.065 unit kapal tambahan.

## 2.7. Ketersediaan Stok Ikan Semester 2 Tahun 2024

Ketersediaan stok ikan merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan yang besar, stok ikan yang cukup akan mendukung tidak hanya kebutuhan konsumsi

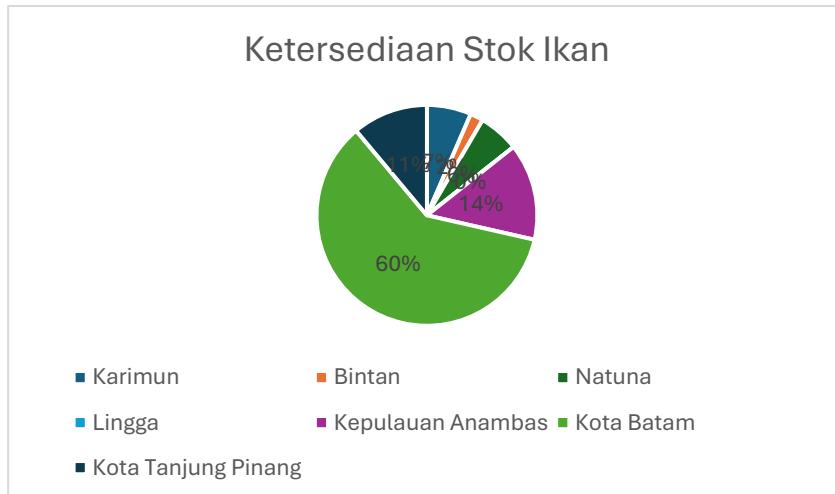
domestik tetapi juga kegiatan ekspor perikanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Data ini mencakup jumlah stok ikan yang tersedia berdasarkan wilayah, yang dapat menjadi indikator penting bagi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan serta perencanaan pembangunan sektor perikanan di daerah ini.

Tabel 6. Ketersediaan Stok Ikan Semester 2 Tahun 2024

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Jumlah Stok Ikan (Ton) (03)
2101	Karimun	516,75
2102	Bintan	152,661
2103	Natuna	473,13
2104	Lingga Kepulauan	0,00
2105	Anambas	1128,627
2171	Kota Batam Kota Tanjung Pinang	4800,48
2172		881,61
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>7.953,26</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 6. Ketersediaan Stok Ikan Semester 2 Tahun 2024

Ketersediaan stok ikan di Provinsi Kepulauan Riau pada Semester 2 Tahun 2024 tercatat sebesar 7.953,26 Ton. Angka ini menunjukkan kondisi yang sangat stabil jika dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2024 (7.924,56 Ton). Kenaikan sangat tipis sebesar 0,36% menunjukkan bahwa stok ikan berada pada titik yang sangat stabil atau stagnan. Kestabilan ini adalah indikator positif

dalam konteks keberlanjutan. Meskipun terjadi lonjakan signifikan pada Volume Produksi Perikanan Tangkap (naik 18,81%) dan ekspansi jumlah armada (naik 32,02%), stok ikan secara keseluruhan masih mampu dipertahankan.

Hal ini menyiratkan dua kemungkinan utama:

1. Pengelolaan yang Efektif:

Upaya konservasi dan pengaturan penangkapan ikan telah berhasil menjaga tingkat eksploitasi di bawah batas *Maximum Sustainable Yield* (MSY) yang aman.

2. Keseimbangan Dinamis:

Peningkatan penangkapan diimbangi dengan regenerasi sumber daya atau adanya perbaikan dalam kondisi lingkungan perairan yang mendukung populasi ikan.

Secara distribusi wilayah di Semester 2 2024, ketersediaan stok ikan terkonsentrasi di beberapa pusat ekonomi perikanan:

1. Kota Batam: Kota Batam menjadi penyumbang stok ikan terbesar dengan 4.800,48 Ton. Dominasi Batam (yang menyumbang lebih dari 60% stok provinsi) menggarisbawahi perannya sebagai pusat pengumpulan dan *stockpile* utama hasil perikanan sebelum diproses atau didistribusikan lebih lanjut.
2. Kabupaten Kepulauan Anambas: Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi penyumbang stok terbesar kedua dengan 1.128,63 Ton, menegaskan perannya sebagai wilayah perairan yang kaya sumber daya yang memasok kebutuhan provinsi.

Data 7.953,26 Ton stok ikan di Semester 2 Tahun 2024 menegaskan ketahanan sumber daya perikanan Kepulauan Riau. Stabilitas stok ini menjadi fondasi penting bagi sektor industri pengolahan dan ekspor.

Implikasi kebijakan yang perlu ditekankan adalah menjaga agar kestabilan stok ini tidak terganggu oleh ekspansi armada yang cepat. Pemerintah daerah perlu memfokuskan pada:

1. Pengawasan Ketat: Memperkuat pengawasan penangkapan di wilayah-wilayah penyumbang stok terbesar (Batam dan Anambas) untuk mencegah *over-fishing*.
2. Sinkronisasi Data: Memastikan bahwa data stok ikan yang stabil ini tetap sinkron dengan peningkatan volume tangkapan, dengan fokus pada *zero growth* (pertumbuhan nol) dalam hal kerusakan lingkungan.

## 2.8. Jumlah Cold Storage Semester 2 Tahun 2024

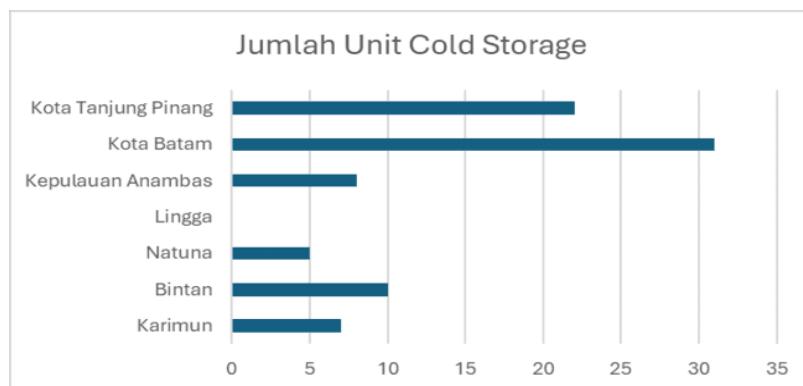
*Cold storage* atau penyimpanan dingin memiliki peranan penting dalam industri perikanan, terutama untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk perikanan agar dapat dipasarkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Di Provinsi Kepulauan Riau, keberadaan *cold storage* yang memadai sangat mendukung sektor perikanan, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, pemantauan jumlah unit *cold storage* serta kapasitas totalnya sangat penting untuk memastikan kemampuan daerah dalam menyimpan dan mengelola produk perikanan dengan baik.

Laporan ini akan mengulas jumlah unit *cold storage* dan kapasitas totalnya di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024, yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam mengelola produk perikanan.

Tabel 7. Jumlah *Cold Storage* dan Kapasitas Total Semester 2 Tahun 2024

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Jumlah Unit <i>Cold Storage</i> (03)	Kapasitas Total (Ton) (04)
2101	Karimun	7	1520
2102	Bintan	10	382
2103	Natuna	5	600
2104	Lingga Kepulauan	0	0
2105	Anambas	8	400
2171	Kota Batam Kota Tanjung Pinang	31	5066
2172		22	577
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>83</b>	<b>8545</b>

Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional



Sumber: DKP, Data Statistik Semester 2 Tahun 2024 Validasi Nasional

Gambar 7. Jumlah *Cold Storage* Semester 2 Tahun 2024

Pada semester kedua tahun 2024, jumlah dan kapasitas *cold storage* Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami perubahan dari semester 1 memiliki 83 unit *cold storage* dengan kapasitas total 8.545 ton, dikarenakan *cold storage* ini dibangun dengan telah menyesuaikan kapasitas masing-masing Unit Pengelola Ikan. Kota Batam menjadi wilayah dengan jumlah unit dan kapasitas *cold storage* terbesar, sementara Lingga tidak memiliki fasilitas *cold storage* sama sekali, yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan fasilitas ini.

Ketersediaan *Cold Storage* Secara Keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 83 unit *cold storage* dengan kapasitas total 8.545 ton pada Semester 2 tahun 2024. Ketersediaan ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung pengelolaan hasil perikanan baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Adapun Kabupaten/Kota dengan Kapasitas *Cold Storage* Terbesar adalah Kota Batam dengan jumlah 31 unit *cold storage* dan kapasitas sebesar 5.066 ton, menunjukkan bahwa Kota Batam sebagai pusat industri perikanan sangat membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. Selain itu, Kota Tanjung Pinang juga memiliki kapasitas yang signifikan dengan 22 unit *cold storage* dan kapasitas 577 ton, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan Kota Batam.

Sedangkan untuk wilayah dengan Potensi Pengembangan Lingga, yang tercatat tidak memiliki unit *cold storage*, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembangunan fasilitas penyimpanan ini. Tanpa adanya *cold storage*, kualitas dan daya saing produk perikanan dari Lingga dapat terhambat. Kepulauan Anambas dengan 8 unit dan 400 ton kapasitas *cold storage* masih memiliki potensi untuk pengembangan kapasitas penyimpanan produk perikanan yang lebih besar.

Pembangunan *cold storage* yang merata di seluruh kabupaten/kota sangat penting untuk mendukung sektor perikanan, terutama dalam menjaga kualitas produk dan mendukung ekspor. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas *cold storage* di wilayah-wilayah yang kurang memiliki fasilitas ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

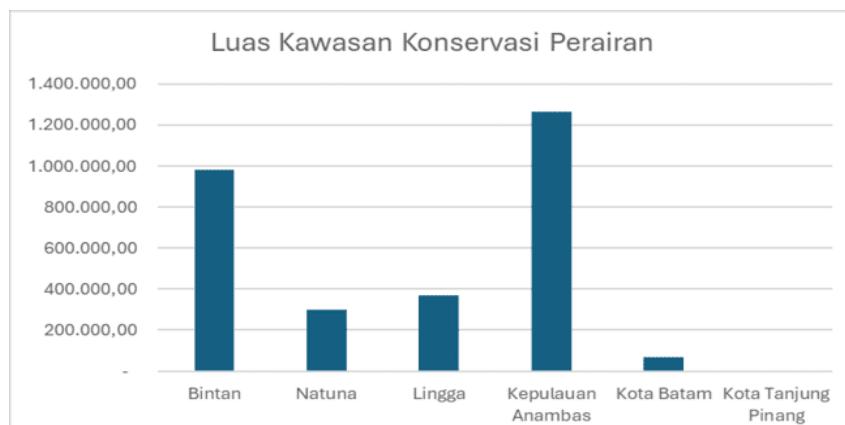
## 2.9. Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi perairan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan perikanan. Kawasan ini ditujukan untuk melindungi sumber daya alam, terutama keanekaragaman hayati laut, serta memberikan ruang bagi pemulihan ekosistem yang terganggu akibat aktivitas manusia. Selain itu, kawasan konservasi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar dengan mempertahankan ketersediaan hasil perikanan yang berkelanjutan.

Di Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari sejumlah pulau dan wilayah pesisir, penting untuk memiliki kawasan konservasi perairan yang memadai. Laporan ini bertujuan untuk memaparkan luas kawasan konservasi perairan yang terdapat di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau pada semester kedua tahun 2024, beserta status dan keterangan terkait pengelolaannya.

Tabel 8. Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kode Wilayah (01)	Kabupaten/Kota (02)	Luas Kawasan (Ha) (03)	Keterangan (04)
2101	Karimun	-	
2102	Bintan	982.170,72	Ditetapkan
2103	Natuna	297.414,51	Pencadangan
2104	Lingga	371.085,02	Pencadangan
2105	Kepulauan Anambas	1.265.401,51	Ditetapkan dan dikelola LKKPN Pekanbaru
2171	Kota Batam	65.868,44	Pencadangan
2172	Kota Tanjung Pinang	-	
<b>2100</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>2.981.940,20</b>	



Gambar 8. Luas Kawasan Konservasi Perairan

Total luas kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Riau pada Semester 2 Tahun 2024 mencapai 2.981.940,20 Hektar. Angka ini menunjukkan kondisi stabil dan tidak ada perubahan (0,00% perubahan) dibandingkan dengan Semester 1 Tahun 2024 (2.981.940,20 Ha).

Kestabilan luas kawasan konservasi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan area konservasi yang sudah ada. Luas kawasan yang hampir mencapai 3 juta hektar ini merupakan aset vital bagi keberlanjutan sektor perikanan. Keberadaan kawasan konservasi ini sangat penting untuk menjaga stok ikan yang stabil (seperti yang dilaporkan pada narasi sebelumnya) dan mendukung peningkatan volume produksi perikanan tangkap.

Luas total kawasan konservasi perairan terbagi berdasarkan status penetapan dan distribusi wilayah:

1. Status Ditetapkan (*Established Area*):

Wilayah yang secara resmi telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi didominasi oleh dua kabupaten kepulauan:

- Kepulauan Anambas menyumbang porsi terbesar dengan 1.265.401,51 Ha. Kawasan ini ditetapkan dan dikelola oleh LKKPN Pekanbaru, menunjukkan pentingnya wilayah ini sebagai zona perlindungan ekosistem laut.
- Kabupaten Bintan menjadi kontributor utama kedua dengan 982.170,72 Ha kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Total area yang sudah ditetapkan mencapai 2.247.572,23 Ha, yang merupakan fondasi kuat dalam upaya perlindungan sumber daya laut di Kepri.

2. Status Pencadangan (*Proposed Area*): Terdapat beberapa wilayah yang masih dalam tahap pencadangan, yang totalnya mencapai 734.367,97 Ha:

- Kabupaten Lingga memiliki luasan pencadangan terbesar, yaitu 371.085,02 Ha.
- Kabupaten Natuna memiliki area pencadangan sebesar 297.414,51 Ha.
- Kota Batam juga memiliki area pencadangan seluas 65.868,44 Ha. Percepatan penetapan area pencadangan ini menjadi kunci untuk menambah luas kawasan konservasi di masa mendatang.

Luas kawasan konservasi perairan di Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan kematangan program konservasi di Provinsi Kepulauan Riau. Area

yang masif (hampir 3 juta hektar) ini berfungsi sebagai lumbung regenerasi yang membantu menyeimbangkan tingginya aktivitas penangkapan.

Implikasi kebijakan yang mendesak adalah:

1. Akselerasi Penetapan: Pemerintah harus berupaya keras untuk mengakselerasi proses penetapan kawasan konservasi yang masih berstatus Pencadangan di Lingga, Natuna, dan Batam, guna memperkuat perlindungan sumber daya secara hukum.
2. Sinergi Pengelolaan: Memastikan sinergi pengelolaan antara kawasan yang sudah ditetapkan (Bintan dan Anambas) dengan program perikanan tangkap, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa merusak fungsi ekologis kawasan lindung.
3. Pengawasan Maritim: Mengingat tingginya ekspansi armada kapal di Kepri, pengawasan di sekitar area konservasi harus diperketat untuk mencegah pelanggaran penangkapan ikan.

## **BAB 3** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kinerja sektor perikanan Kepulauan Riau pada Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif di bidang produksi dan nilai tambah, namun menghadapi ancaman serius di bidang infrastruktur.

Tingkat produksi mencapai pertumbuhan signifikan pada subsektor Perikanan Tangkap (+18,81%) dan Budidaya (+28,16%), yang memicu lonjakan Produksi Olahan yang luar biasa (+66,34%). Kinerja ini mengukuhkan Batam sebagai pusat hilirisasi dan berkontribusi besar pada Volume Ekspor Perikanan provinsi. Di sisi keberlanjutan, provinsi ini berhasil menjaga Ketersediaan Stok Ikan tetap stabil (+0,36%) di tengah tingginya aktivitas penangkapan, didukung oleh Luas Kawasan Konservasi yang signifikan (2,98 juta Ha).

### **3.2. Saran**

Untuk meningkatkan kinerja sub sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, beberapa langkah perlu diambil. Kedua, peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan dan fasilitas *cold storage* sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil perikanan, menjaga kualitas produk, dan mengurangi pemborosan. Kedua, pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan harus diperkuat dengan kebijakan yang mendukung konservasi sumber daya laut agar ekosistem tetap terjaga dan produksi perikanan tidak terganggu.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pelaku usaha perikanan akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, diversifikasi produk olahan perikanan perlu digalakkan untuk menciptakan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas pasar domestik serta ekspor.